

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: PPK-Pokja ULP Dituding Korupsi APBD
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Radar Bandung/Hal.7
Edisi	: Selasa, 24 Oktober 2017

PPK-Pokja ULP Dituding Korupsi APBD

BANDUNG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya memeruskan kasus dugaan mark up (pengelembungan) harga terhadap anggaran pengadaan kapal sebesar Rp10,2 miliar lebih dan pemalsuan dokumen dukungan galangan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar.

"BPK jangan mengejar pengembalian kerugian negara saja, karena terlalu enak bagi oknum pejabat, seperti PPK dan Pokja ULP Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar yang hanya diminta hanya mengembalikan kerugian negara," tegas Wakil Ketua 1 DPP LSM Barisan Muda Indonesia (BASMI), Jackson ST, Senin (23/10).

Proyek yang dirogoh dari anggaran 2014 ini menganggarkan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dalam APBD Jabar Rp 16.333.313.000. Salah satu realisasi dari belanja modal tersebut diperuntukan pembangunan tujuh unit kapal perikanan 30 Groos Ton (GT). Tak heran, bila Jackson meminta aparat penegak hukum mengejar dugaan mark up dan pemalsuan surat dukungan galangan pembangunan kapal perikanan 30 GT dengan alat tangkap Gillnet dan pembangunan kapal perikanan 30 GT dengan alat tangkap Longline dan jaring cumi tersebut.

"Dugaan korupsi sebesar



Jackson ST

Rp 10.299.100.000 harus disikapi oleh aparat penegak hukum. Lebih baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pokja ULP mempertanggungjawabkan secara hukum dan tidak hanya dituntut mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai instruksi BPK. Jangan salahkan ketika korupsi tumbuh subur di pemerintahan, karena BPK sendiri yang tidak membuat efek jera bagi oknum yang sengaja berjiwa korup," kata Jackson.

Dua paket pembangunan kapal perikanan 30 GT alat tangkap Gillnet Rp 5.922.500.000 dan alat tangkap Longline dan jaring Cumi Rp 4.376.600.000 dimenangkan PT KM yang beralamat di Tangerang, Banten. Alat tangkap Gillnet nomor kontrak 602.1/3362/Tangkap tanggal 17 April 2014, jangka waktu pelaksanaan untuk mengerjakan empat unit kapal perikanan > 30 GT alat tangkap Gillnet 180 hari kalender, dengan nilai kontrak Rp 5.922.500.000.

Berita Acara (BA) serah terima hasil pekerjaan 100 persen dilakukan No.027/10053/Tangkap tanggal 1 Desember 2014. Bukti lunas dibayarkannya hasil pekerjaan No.938/24174/LS/KEU tanggal 23 Desember 2014. Alat tangkap Longline dan jaring Cumi nomor kontrak 602.1/3360/Tangkap tanggal 17 April 2014, jangka waktu pelaksanaan untuk mengerjakan tiga unit kapal perikanan > 30 GT alat tangkap Longline dan jaring Cumi 180 hari kalender, dengan nilai kontrak Rp 4.376.600.000. BA serah terima hasil pekerjaan 100 persen dilakukan No.027/10054/Tangkap tanggal 1 Desember 2014.

Bukti lunas dibayarkannya hasil pekerjaan No.938/24173/LS/KEU tanggal 22 Desember 2014. Jackson ST menegakkan, pemecahan kontrak yang dilakukan PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar, sehingga diduga honor PPK, panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan lebih banyak.

"Selain itu, dalam dokumen penawaran PT KM mengklaim kepemilikan galangan kapal sendiri di Tangerang, tapi faktanya perusahaan ini hanya menyewa. Dan di tempat PT KM menyewa itulah mensubkontrakan pekerjaan secara keseluruhan dengan SPK No.069/KM/V/2014 tanggal 2 Mei 2014," bebarnya. (man/mun)